

DUALISME KEPEMIMPINAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Study pada Partai Persatuan Pembangunan DPC Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



Oleh:
Tesar Adi Irawan
1131040018

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing 1 : Drs. Effendi M. Hum

Pembimbing 2 : Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2019 M

PERNYATAAN

ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tesar Adi Irawan
NPM : 1131040018
Jurusan : Pemikiran Politik Islam (PPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Dualisme Kepemimpinan Partai Dalam Perspektif Islam**” (study pada **DPC PPP bandar Lampung**) adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sepenuhnya.

Bandar Lampung. Juni 2019
Yang Menyatakan

Tesar Adi Irawan
1131040018

A B S T R A K

DUALISME KEPEMIMPINAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Study Pada Partai Persatuan Pembangunan di DPC Kota Bandar Lampung)

Oleh

Tesar Adi Irawan

Dampak dualisme kepemimpinan terjadi karena tidak mampunya seseorang pemimpin dalam mengelola konflik yang sedang terjadi yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara dua orang atau lebih dalam suatu hubungan dengan orang lain. Partai atau kelompok yang mampu mengelola konflik yang terjadi, dengan dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan juga kepribadian diri yang matang. Partai atau kelompok yang memiliki kecerdasan emosi yang baik dapat menentukan dengan tepat kapan dan sejauh mana perlu terlibat dalam masalah dualisme kepemimpinan partai, serta dapat memberikan jalan keluar atau solusi yang diperlukan. Selain itu Partai atau kelompok yang memiliki kematangan diri yang baik bisa menyelesaikan dan meminimalkan konflik yang terjadi baik didalam partai atau kelompok maupun diluar partai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana dampak dualisme kepemimpinan partai persatuan pembangunan DPC Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimanakah pandangan islam terhadap dualisme kepemimpinan? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak dualisme kepemimpinan partai persatuan pembangunan study kasus DPC PPP kota bandar lampung dan bagaimanakah sudut pandang islam terhadap dualisme kepeminpinan . Peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan subjek penelitian DPC PPP Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dampak yang signifikan terhadap dualisme kepemimpinan yang terjadi di DPP PPP hingga keseluruhan jajaran pengurus partai baik dari tingkatan pengurus pusat hingga pengurus partai tingkat ranting (kecamatan) hampir seluruh indonesia. Upaya penyelesaiannya dari pihak partai di kembalika kepada para sesepuh organisasi sayap partai yaitu melalui ormas PARMUSI dan Ormas NU yang sampai saat ini masih bisa jadi patron dan dihormati oleh kedua yaitu kyai. Maimun Zubair, sehingga beliau mengambil jalan musyawarah bersama untuk menemukan damai atau islah dan akhirnya Muhtamar itu Juga dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly. Dalam hal ini terkait sudut pandang islam menawarkan pedamaian dari dua atau lebih melalui jalan musyawarah untuk islah sesuai dengan Q.S al-Hujurat : 9, musyawarah dengan jalan saling menyadari kekurangan masing-masing dan berfikir bersama untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (Q.S. Al. Hujurat: 9)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan senantia mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta kasih, perhatian serta memberikan motivasi selama studi saya.

1. Khusus saya persembahkan Skripsi ini untuk Alm. (pak su) Dr. Himyari Yusuf, M.Hum beliauah Yang membawa saya untuk kuliah di Fakultas Ushuluddin dan di Jurusan Pemikiran Politik Islam dan bannyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan kebaikan beliau semoga Allah SWT mencatat kebaikan beliau menuju surganya Allah SWT Aamiin
2. Mbah Ratem tercinta, Bapak Sarino, Bapak Bunyamin, Mamak Nasibah yang telah mendidik, mengasuh, membimbing, mengarahkan, mendo'akan, memotivasi dalam menuntut ilmu serta dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan magfiroh-Nya kepada keduanya. Aamiin
3. Yang ku sayangi Istriku tercinta Dedeh Alfianita, Anakku M.Dzakir Hafidz dan kedua mertuaku serta semua keluargaku yang telah mendukung dan seelu memberikan semangat kepada penulis yang tak pernah mengharapkan balasan apapun
4. Sahabat-sahabat semuanya yang selalu meluangkan perhatiannya dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin yang telah banyak memberikan pengalaman dan keilmuan yang bisa menambah pengetahuan dalam proses menjadi insan akademis yang baik.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Tesar Adi Irawan, dilahirkan di mesuji pada tanggal 23 Juni 1992, anak pertama dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan berbahagia Bapak Sarino dan Nasibah.

Riwayat pendidikan penulis lulus dari SDN 8 Candimas Kota Bumi pada tahun 2005, dan melanjutkan pendidikan pada SMPN 1 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan lulus pada tahun 2008. Setelah lulus kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri I Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan lulus pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam. Dalam dunia kemahasiswaan, penulis aktif dalam organisasi intra maupun ekstra kampus. Penulis pernah menjadi salah satu pendiri organisasi intra kampus yakni, UKM-PUSKIMA (Pusat Kajian Ilmiah Mahasiswa), pernah menjadi salah satu pendiri organisasi (PMM) dan diamanahi sebagai Wakil Ketua Umum periode 2012-2013 pada organisasi Persatuan Mahasiswa Mesuji (PMM) Lampung serta menjadi Kabid PTKP Periode 2013-2016 pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Ushuluddin.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas izin dan Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul *Dualisme Kepemimpinan Partai dalam Perspektif Islam (Study Kasus Partai Persatuan Pembangunan di DPC Bandar Lampung)*. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat menuju cahaya ilahi.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung .

Penulis menyadari dengan bantuan dan bimbinganlah, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu rasa hormat dan penghargaan yang tulus serta terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT, memberi balasan kebaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini, khususnya di Fakultas Ushuluddin.
2. Bapak Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuludin UIN Raden Intan Lampung.

3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. Effendi, M.Hum (selaku pembimbing 1) dan Bapak Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si (selaku pembimbing II) yang telah ikhlas membagi dan membekali ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuludin UIN Raden Intan Lampung yang telah ikhlas membagi dan membekali ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai pengetahuan dibidang Pemikiran Politik Islam
5. Seluruh jajaran staf karyawan Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, terima kasih atas ketulusan dan kesediannya membantu penulis dalam menyelesaikan syarat –syarat administrasi.
6. Seluruh jajaran staf karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, terima kasih atas diperkenankannya penulis meminjam literatur yang dibutuhkan guna terselesainya skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga atas motivasi dan do'a dari semua pihak baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum, menjadi catatan ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Bandar Lampung, Juni 2019
Penulis

Tesar Adi Irawan
1131040018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. DUALISME KEPEMIMPINAN PARTAI PERSATUAN PEMPANGUNAN	21
A. Dualisme dan Kepemimpinan	21
B. Partai Politik.....	25

C. Konflik	30
D. Elit Politik	34
BAB III Profil Partai Persatuan Pembangunan	38
A. Sejarah Singkat Partai Persatuan Pembangunan.....	38
B. Visi dan Misi Prinsip Dasar PPP Kota Bandar Lampung.....	50
1. Visi	50
2. Misi	50
3. Struktur organisasi PPP	51
BAB IV Dualisme Kepemimpinan Partai Politik.....	52
A. Gambaran Dualisme Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan.....	52
B. Dampak Dualisme Kepemimpinan PPP Kota Bandar Lampung	58
C. Dualisme Kepemimpinan Dalam Sudut Pandang Islam	63
BAB V. PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Pemilu 1999 DPRD Kota Bandar Lampung
Tabel 2	Hasil Pemilu 2004 DPR-RI
Tabel 3	Hasil Pemilu 2009 dan 2014 DPRD Kota Bandar Lampung
Tabel 4	Perolehan Kursi DPRD PPP Kota Bandar Lampung Dari Tahun 2009-2019



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Surat Rekomendasi Penelitian Survei
Lampiran II.	Kartu Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempertegas dan mempertegas makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, peneliti akan terlebih dulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya sebagai berikut:

1. Dualisme dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan.¹ Dualisme mengklai bahwa fenomena mental adalah identitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal dari jaman plato dan aristoteles dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan.

2. Kepemimpinan dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata “pimpin” memiliki arti perihal pemimpin atau cara memimpin. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh, dari pemimpin kepada pengikut atau bawahnya dalam upaya mencapai tujuan tertentu.² Beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli:

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.1092

² *Ibid.*, h.1221.

Miftah Thoha, mendefinisikan kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.³

Menurut Sudarwan Danim kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya⁴.

Martinis Yamin dan Maisah kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan.⁵

George R. Terry mengartikan kepemimpinan sebagai aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya⁶

³ <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/09/pengertian-kepemimpinan-menurut-para.html>

⁴⁴ Siagian, P. Sondang, *Teori dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.56

⁵ *Ibid*, 2010, hal.74

⁶ *Ibid*, 2010, hal.68

Menurut A. Dale Timple, kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial di dalam mana manajer mencari keikutsertaan sukarela dari bawahan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi.⁷

Dari sejumlah pengertian kepemimpinan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor keberhasilan seorang pemimpin diantaranya tergantung pada teknik kepemimpinan dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan peneliti dalam memilih judul skripsi tentang dualisme kepemimpinan partai persatuan pembangunan dalam prespektif islam ini adalah:

1. Dinamika perpolitikan indonesia dalam ambang perpecahan, apalagi dalam dunia politik praktis terutama partai politik, bahkan beberapa partai politik yang sudah berdiri lama dan besar justru mengalami goncangan politik yang begitu hebat seperti halnya dualisme

⁷ <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/09/pengertian-kepemimpinan-menurut-para.html>

kepemimpinan partai PPP yang terjadi di DPP (Pusat) berdampak hingga ke tingkat daerah hingga seluruh Indonesia.

2. Dualisme kepemimpinan suatu hal yang lumrah dan biasa terjadi di sebuah organisasi mahasiswa, ormas partai politik dan masih banyak lagi, dan dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang dualisme kepemimpinan yang terjadi di partai persatuan pembangunan (PPP) dan dampak yang ditimbulkan terhadap DPC Kota Bandar Lampung.
3. Penulis memiliki kedekatan emosional dengan partai ini yaitu sebagai keluarga Nahdhiyin
4. Judul ini diangkat karena ada relevansinya dengan jurusan penulis, yaitu jurusan pemikiran politik Islam. Serta lokasi penelitian, mudah dijangkau dengan sarana dan biaya yang tidak berlebihan.

C. Latar belakang masalah

Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis Kepemimpinan Nasional yang mengarah pada Dualisme Kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat Presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga dua kali oleh MPRS. Sementara itu Soeharto setelah mendapat Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno,

Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.

Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai Pemimpin Kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya “Dualisme Kepemimpinan Nasional”, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen. Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan.⁸

Adanya “Dualisme Kepemimpinan Nasional” ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dualisme kepemimpinan ini pun terjadi juga pada saat sekarang ini, yakni terjadi pada Internal partai politik Islam khususnya Partai Persatuan Pembangunan yaitu PPP, berbicara tentang politik tidak terlepas dari Partai-partai politik yang bermunculan baik itu berbasis Islam maupun Nasionalis, di sini kita bisa melihat betapa banyaknya partai yang bermunculan di Indonesia kemudian partai-partai yang ada hanya mengejar tujuan-tujuan tertentu baik itu kelompok maupun golongan tidak memikirkan definisi politik itu sendiri.

Akan tetapi, kegiatan politik ini banyak menimbulkan konflik karena nilai-nilai (baik yang materil maupun mental) yang dikejar biasanya langka

⁸ Siagian, P. Sondang, *Dualisme, Teori dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), h 9-10

sifatnya. Di pihak lain di Negara Demokrasi, kegiatan politik ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflik resolution*) atau konsensus (*consensus*).

Hal ini tidak dapat di sangkal bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan politik, di samping segi-segi yang baik, juga mencakup segi-segi yang buruk atau negatif. Hal ini disebabkan karena mencerminkan tabiat manusia, baik nalurnya yang baik maupun nalurnya yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya, sangat mendalam dan sering saling bertentangan mencakup rasa cinta, benci, setia, bangga, malu, dan marah. Tidak heran jika dalam kehidupan sehari-hari kerap kali kita berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji seperti yang dirumuskan oleh Peter Melk politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for fower, glori and riches*) yaitu perbuatan kuasa tahta dan harta.⁹

Dalam kehidupan masyarakat Demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Perbedaan dan persaingan dalam bentuk apapun bisa menjadi konflik baik antar individu maupun kelompok. Jika terjadi konflik, maka tugas partai politik untuk mengatasinya.

⁹ Gatara, Sahid, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Kajian*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007), h. 228-229

Partai politik merupakan prasyarat tegaknya Demokrasi. Partai politik juga sebagai alat perjuangan memperebutkan suara pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan.

Namun demikian dalam kenyataan partai-partai politik yang ada hanya mengejar tujuan-tujuan kelompok dan golongan-golongannya sendiri, serta mengabaikan kepentingan-kepentingan publik ironisnya partai-partai politik yang ada juga berfungsi sebagai pemicu konflik internal di dalam partai politik itu sendiri baik dari partai politik Islam maupun partai politik nasionalis.¹⁰

Berbicara tentang partai politik Islam istilah partai Islam di Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang asing. Hal itu disebabkan karena bangsa ini sudah mengenal istilah tersebut sejak tahun 1911 yaitu dengan berdirinya Syarekat Islam. Istilah partai Islam semakin marak sejak awal pemerintahan Orde Lama dengan tumbuhnya partai-partai berbasis massa Islam yang ikut berkiprah pada pemilu 1955. Tidak dapat dipungkiri dengan runtuhnya rejim Orde Baru 1998 maka tumbuhlah puluhan partai politik yang secara nyata mengangkat Islam sebagai asasnya.

Partai politik Islam disini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia PSII, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). yang dideklarasikan pada tanggal 9 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqadha 1392 Hijriyah merupakan partai politik penerus estafeta empat partai Islam dan wadah

¹⁰ Dahrendorf, Ralf, *Konflik Dan Konflik dalam masyarakat industri, sebuah analisis kritis*, Ali Hamdan (pentj.) Jakarta, CV. Rajawali, 1986. H. 160

penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat Islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjuangan politik. Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan atau berbasis Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridloi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tekad dan kesadaran tersebut disampaikan melalui suatu deklarasi. Partai Persatuan Pembangunan ini ketua umum-nya yang pertama pada periode 9 Januari 1973 hingga tahun 2014, yakni H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH. Hingga selanjutnya ketua umum partai secara berturut-turut antara lain H. Jailani Naro, SH, H. Ismail Hasan Metareum, SH, H. Hamzah Haz dan yang terbaru adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih melalui Muktamar VI yang diadakan pada tahun 2007 sampai 2014 dan sekarang masih diperdebatkan karna adanya konflik.¹¹

Sebagai organisasi politik yang hidup di era reformasi maka Partai Persatuan Pembangunan tidak terlepas dari pergulatan dan dinamika dan peluang terjadinya konflik sangat besar. Sebagaimana yang diketahui konflik internal partai Islam yang terjadi sebut saja Partai Persatuan Pembangunan

¹¹ Aziz, Abdul, *Politik Islam Politik Pergaulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, (Yogyakarta, Tiara Kencana, 2006), h 12-14

(PPP) dua Kepengurusan Fersi antara Kepengurusan Fersi Romahumurziy dan Kepengurusan Fersi Djan Fariz yang diawali dengan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surya dharmah alidianggap oleh sebagian besar ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dan jajaran elite Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Persatuan Pembangunan telah bertindak melanggar batas Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan PPP, Aunur Rofiq menyatakan kisruh dan konflik internal Partai Persatuan Pembangunan murni disebabkan karena tindakan dan sikap politik ketua umum PPP Surya dharmah aliyang di anggap oleh jajaran pemimpin elite PPP lainnya telah melanggar AD/ATR Partai Persatuan Pembangunan PPP.¹²

Pelanggaran ketua umum PPP, Surya dharmah aliterlihat jelas dari tindakannya tidak menghadiri kampanye partai Gerakan Indonesia Raya GERINDRA bersama wakil ketua penasehat PPP, KH. Muhammad Nur Iskandar SQ dan fungsionaris PPP Djan Fariz dalam kampanye terbuka partai GERINDRA.¹³

Seperti sikap fanatik, tidak dapat menerima perbedaan dan belum memiliki sikap kedewasaan dalam berpolitik bahkan masih terbawa oleh sikap Ta'assub golongan yang pada akhirnya mengakibatkan konflik dalam masyarakat ataukah ada sebab-sebab lain, sehingga mereka seperti mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya tentang pentingnya

¹² LIPUTAN 6.COM, *perseteruan partai persatuan pembangunan*, JAKARTA, 2014. Di akses pada 10 maret 2015

¹³ PEMILU.COM, *penyebab konflik internal partai persatuan pembangunan*, JAKARTA, 2014 di akses pada 10 maret 2015

Ukhuwah atau persaudaraan menuju Wahdatul Ummah yakni persatuan dan kesatuan umat.

Kembali pada persoalan latar belakang terjadi konflik yang terjadi di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah pelanggaran yang dilakukan oleh ketua umum partai itu sendiri sebut saja Surya Darma Ali,¹⁴ melanggar kode etik yang ada di dalam partai itu, berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh ketua umum Partai Persatuan Pembangunan PPP itu atau apakah perbuatan tersebut merupakan tindakan efektif.

Dibawah ini ada dua serjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik partai politik:

1. Menurut Rodhague et al: politik adalah kegiatan yang menyangkut bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.
2. Menurut Andrew Heywood : politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan yang umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.¹⁵

Dalam teori ini konflik yang dimaksud adalah kondisi ketidakcocokan, perbedaan atau salah paham di dalam Partai Persatuan

11. Republika.co.id, *kisruh konflik elit partai persatuan pembangunan*, JAKARTA, 2014 di akses pada 10 maret 2015

¹⁵ Boudiarjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*

Pembangunan antara Kepengurusan Fersi Romahumurziy dan Kepengurusan Fersi Djan Fariz.

Kemudian masalah konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadapi ini berefek pada para elit pengurus PPP di Daerah-daerah begitu juga pada DPC PPP Bandar Lampung, efek konflik Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan memecah PPP Bandar Lampung menjadi dua Kepengurusan Fersi yaitu Kepengurusan Fersi Romahuruzy diketuai pelaksana tugas Busyairi,SE sedangkan Kepengurusan Fersi Djan Faridz diketuai oleh Nursyamsi, ST yang merupakan pengurus DPC Bandar Lampung sebelumnya.

Kepengurusan Nursyamsi, ST ilegal karena dia telah dipecat dari kepengurusan," ujar pelaksana tugas Ketua DPC PPP Bandar Lampung, Menurut H.Hambali Sanusi, pemecatan itu dilakukan berdasarkan surat keputusan DPP PPP yang ditandatangani Ketua Umum Romahurmuziy pada 22 April lalu. SK itu juga mengangkat Busyairi,SE sebagai pelaksana tugas ketua dan H.Hambali Sanusi sebagai pelaksana tugas sekretaris di DPC PPP Bandar Lampung. "Hanya ada satu yang kepengurusan DPC di Bandar Lampung. Nursyamsi, ST sudah diberhentikan," ujar Busyairi,SE.¹⁶

Sementara itu, dan H.Hambali Sanusi sebagai sekretaris di DPC PPP Bandar Lampung ,mengatakan awalnya semua kader PPP di Bandar Lampung tetap konsisten dengan hasil beberapa kali rapat pimpinan wilayah yang menyatakan DPC PPP Bandar Lampung netral dalam menyikapi Dualisme

¹⁶ Wawancara dengan busyairi,SE, kubu Romahuruzy, Ketua Pelaksana Harian DPC Kota Bandar Lampung Saat ini, pada tanggal 05 November 2017 di Kantor DPC Kota Bandar Lampung, Jln. P. antasari, Pukul 14.00 Wib

kepengurusan PPP di pusat dan menunggu keputusan pengadilan *Inkracht*. Bagi mereka saat itu, siapa pun yang menang di pengadilan, itulah Ketua Umum PPP. "Namun setelah rapat pimpinan wilayah terakhir April lalu, ada beberapa kader yang menjemput SK dari Kepengurusan Fersi Romi dan memecatnya secara sepihak Nursyamsi, ST menyatakan tak menerima keputusan sepihak itu. Karena itulah saat ini dia terang-terangan mendukung Kepengurusan Fersi Djan Faridz.¹⁷

Dari latar belakang yang telah Penulis paparkan diatas, baik itu tersurat maupun tersirat dan dari hal diatas jugalah yang melatar belakangi Penulis untuk membuat suatu karya ilmiah yang berupa sebuah Skripsi yang berjudul **“DUALISME KEPEMIMPINAN PARTAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Study Kasus Partai Persatuan Pembangunan di DPC Bandar Lampung)”**.

¹⁷ Wawancara dengan Nursyamsi, ST, Kubu Djan Faridz Nurdin yang merupakan pengurus DPC Kota Bandar Lampung sebelumnya, pada tanggal 05 November 2017 di rumah jl. Riduan rais prum. Gunung madu permai, Bandar Lampung, pukul 19:10 Wib

D. Rumusan masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah gambaran dampak Dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan di DPC di Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah dampak Dualisme kepemimpinan yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan Kota Bandar Lampung?

Penulis juga membatasi masalah ini hanya seputar Dualisme kepemimpinan di DPC Bandar Lampung terhadap konflik elit yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut

- a. Menganalisa sejauhmana dampak perpecahan dualisme di DPC Bandar Lampung pada khususnya menyikapi konflik internal PPP
- b. Menganalisa bagaimana pandangan islam terhadap dualisme kepemimpinan di DPC Bandar Lampung terhadap konflik Partai Persatuan Pembangunan PPP

2. Manfaat penelitian

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti sikap politik di DPC Kota Bandar Lampung terhadap konflik internal partai persatuan pembangunan pembangunan.

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah kepustakaan dalam partai politik islam
- b. Memberikan pemahaman-pemahaman atas hal yang terjadi di dalam persoalan konflik pada partai-partai yang ada baik itu partai yang berbasis islam maupun partai politik nasionalis
- c. Sebagai suatu rujukan untuk mengembangkan ilmu bagi mahasiswa fakultas Ushuluddin pada umumnya dan jurusan Pemikiran Politik Islam pada khususnya, di Universitas Agama Islam UIN Raden Intan Lampung.

F. Tinjauan Pustaka

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan penelitian.

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di strata satu dalam berbagai disiplin ilmu untuk membuat sebuah karya tulis yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidangnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini..

Nurul Radiatul Adawiyah, Bp : E11109003, Universitas Hasanudin, yang berjudul: *Konflik internal Partai Nasdem studi tentang partai nasdem Bandar Lampung* . Yang mana dalam pembahasannya di dalam tubuh partai nasdem tersebut terjadi konflik dua Kepengurusan Fersi yaitu konflik antara Harry Tanoessudibjo dan berdampak ke DPC kota bandar lampung .¹⁸

Yuni Wulandari NIM 3301409046 Univeristas Negeri Semarang “*Dualisme Kepemimpinan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Adat Karang Paninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis*”, yang mana dalam pembahasannya membahas Dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam masyarakat adat dilatarbelakangi oleh adanya faktor budaya adat, kearifan lokal, sejarah dan adanya kesepakatan antara pemimpin formal dengan pemimpin informal yaitu antara dewan adat dengan pemerintahan desa.¹⁹

Dualisme kepemimpinan di indonesia : pejabat publik dan pemimpin parpol. Oleh susanti dwi utami, universitas terbuka tahun 2013. Penelitian ini memfokuskank kajiannya terhadap pejabat publik, dampak yang terjadi akibat adanya dualisme kepemimpinan pejabat publik, dampak adanya jabatan rangkap yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Dari tinjauan Pustaka diatas dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa penelitian tentang judul yang penyusun buat belum pernah ada yang membahas sebelumnya.

¹⁸ Nurul Radiatul Adawiyah, Bp : E11109003, Universitas Hasanudin, yang berjudul: *Konflik internal Partai Nasdem studi tentang partai nasdem sulawesi selatan, 2015*

¹⁹ Yuni Wulandari NIM 3301409046 Univeristas Negeri Semarang “*Dualisme Kepemimpinan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Adat Karang Paninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis*”, 2013

G. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Pustaka

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku Fiqih Siyasah, buku-buku Politik, jurnal, surat kabar, dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

b. Penelitian Lapangan

Jenis penelitian ini adalah turun ke lapangan untuk mencari data-data yang Failed, yaitu dengan cara wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Komparatif-Analitik*, di mana penyusun menguraikan secara sistematis Dualisme kepemimpinan di DPC Bandar Lampung terhadap konflik elit yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum positif normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum. Maka dalam penelitian ini penyusun mencoba memahami perbincangan seputar Dualisme kepemimpinan di DPC Bandar Lampung terhadap konflik elit yang

terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan dengan kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang Dualisme kepemimpinan di DPC Bandar Lampung terhadap konflik elit yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan.

b. Sumber data

1) Sumber Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.²⁰ Dalam data primer ini peneliti menggunakan responden dan informan dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Responden sendiri berasal dari kata “respon” atau penanggap, yaitu orang yang menanggapi.²¹

Dalam penelitian ini responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, keterangan tersebut disampaikan dalam bentuk lisan atau didapat dengan wawancara langsung. Responden ini sendiri yaitu : para pengurus inti DPC PPP Kota

²⁰ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gama Press, 1987),h 81

²¹ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, edisi ketiga,(jakarta:balai pustaka,2007), h.1011

Bandar Lampung yang masuk dalam kepengurusan partai. dari Buku-buku lainnya yang berkaitan dengan Judul Skripsi yang dibuat penulis.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi dan lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sekunder juga seringkali disebut juga data yang tersedia. Data sekunder merupakan data perlengkapan dari data, literatur, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.²² Dalam Data sekunder peneliti menggunakan buku-buku dan literatur yang relevan, yang membahas Dualisme kepemimpinan PPP di DPC Bandar Lampung terhadap konflik elit yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan menurut Perspektif Islam secara umum.

Kedua data tersebut di pergunakan dengan saling melengkapi, karena data yang ada di lapangan tidak akan sempurna apa bila tidak ditunjang dengan data keperpustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber datatersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Analis Data

Data-data yang dipeoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, melalui metode deduktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum.

²² *Op. Cit*, Hadar Nawawi, h.83

H. Sistematikan Penulisan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Penjelasan judul, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori yaitu: Sikap politik dan teori konsep politikt injauan kepustakaan metode penelitianSistematika penulisan.

Bab kedua merupakan Dualisme Kepemimpinan dalam arti tinjauan teoritis yaitu; Dampak Dualisme Kepemimpinan dan Dualisme Kepemimpinan Menurut Perspektif Isam.

Bab ketiga merupakan Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik Islam, Latar belakang lahir nya PPP, Sejarah pembentukan Partai Persatuan Pembangunan yang mempelopori Partai Persatuan Pembangunan landasan ideologi pergerakan PPP, ideologi PPP sebagai partai yang berbasis islam, Paham agama yang di anut dan asas pemikiran PPP.

Bab keempat merupakan Analisis Dualisme Kepemimpinan Di DPC Bandar Lampung Terhadap Konflik Partai Persatuan Pembangunan, yang meliputi Analisis Dualisme Kepemimpinan Di DPC Bandar Lampung yang Terjadi di Internal Paratai Persatuan Pembangunan dan Analisis Dualisme Kepemipinan Menurut Politik Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang di bagi atas kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

Hebert Blumer Sebagaimana dikutip Abudin Nata mengatakan bahwa teori pada pokoknya merupakan pertanyaan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antar gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, mengimpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.²³

A. Dualisme dan Kepemimpinan

Dualisme dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan.²⁴ Dualisme mengklai bahwa fenomena mental adalah identitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal dari jaman plato dan aristoteles dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan.

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang

²³ Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. 1 Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2004), h. 184.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga,(Jakarta:Balai Pustaka, 2007), hal.1092

mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia tersebut dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu.

Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut dengan *Leadership* (kepemimpinan) adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini perilaku dari seorang individu yang mampu mengkoordinasi aktifitas-aktifitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama.

Menurut Stoner, kepemimpinan dapat di definisikan sebagai sesuatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.²⁵

Siagian merumuskan kepemimpinan sebagai suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja bersama-sama menuju suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan kelompok tersebut.²⁶

²⁵ Umam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. (Bandung: Pustaka Setia) , h. 156

²⁶ Nawawi, Hadari & Hadari, M. Martini. 2004. *Kepemimpinan yang Efektif*. (Gadjah Mada University Press : Yogyakarta). h. 113.

Begitupun Hasibuan mendefinisikan kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.²⁷

Dari pendapat yang dirumuskan para ahli di atas dapat diketahui bahwa konsepsi kepemimpinan itu sendiri hampir sebanyak dengan jumlah orang yang ingin mendefinisikannya, sehingga hal itu lebih merupakan konsep berdasarkan pengalaman.

Sutjipto Wirosardjono mengatakan bahwa, seseorang itu hanya bisa memimpin kalau dia pernah dengan sukses bisa menjadi orang yang dipimpin. Sebab kalau dia tidak pernah merasakan menjadi orang yang dipimpin, maka dia tidak bisa menjalankan perannya tadi sebagai orang yang dipimpin. Jadi dalam bahasa sehari-harinya seorang pemimpin itu pada hakikatnya adalah seorang yang mengikuti kehendak konstituennya, yang bisa dengan tulus hati mensubordinasikan kehendaknya kepada kehendak konstituennya.²⁸

Maka, hampir sebagian besar pendefinisian kepemimpinan memiliki titik kesamaan kata kunci yakni “suatu proses mempengaruhi”.²⁹

Senada dengan pendapat di atas John C. Maxwell juga mengatakan hal yang hampir sama. Menurutnya, yang mengatakan bahwa “mintalah sepuluh orang untuk memberikan definisi tentang

²⁷ Ilham Mawardi Siwesdi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (Skripsi, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 2012), h. 15.

²⁸ Fauzi HA dan Mochamad, HMI Menjawab Tantangan Zaman , (Jakarta: PT. Gunung Kulabu, 1990) h. 76.

²⁹ Op. Cit., h. 18.

kepemimpinan, dan mungkin Anda akan mendapat sepuluh jawaban yang berbeda”. Untuk itulah Maxwell mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Begitupun James C. George yang mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut.³⁰

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “kepemimpinan” tidak dijelaskan secara rinci hanya dibahasakan dengan artian perihal pemimpin atau cara memimpin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama.

Dualisme kepemimpinan yang terjadi Indonesia adalah jabatan rangkap sebagai pemimpin dalam jabatan publik dan pemimpin partai politik. Konstitusi memungkinkan seorang pemimpin partai politik menduduki jabatan publik seperti presiden atau menteri, sebab jabatan publik memuat unsur politis yang masih dipahami harus berasal dari partai politik. Dualisme kepemimpinan ini menjadi salah satu faktor penyebab rumitnya transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia.³¹ Perangkapan kepemimpinan dapat dengan mudah digunakan pemimpin untuk mengakumulasi kekuasaan dengan

³⁰ John C. Maxwell, *Mengembangkan Kepemimpinan di dalam Diri Anda*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), h. 1

³¹ Susanti, Susanti and Utami, Herwati Dwi (2013) *Dualisme Kepemimpinan di Indonesia: Pejabat Publik dan Pemimpin Parpol*. In: Seminar Nasional Fisip-UT 2013.

alasan demi kepentingan masyarakat, sehingga munculnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pemimpin publik terkait dengan partai politik yang menjadi afiliasinya. Hal tersebut relevan dengan teori Acton bahwa kekuasaan cenderung korup dan esensi utama pembagian kekuasaan oleh John Locke dan Montesquieu. Fenomena yang terjadi di Indonesia justru menunjukkan bahwa parpol yang seharusnya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik ternyata justru melahirkan pemimpin publik yang bermasalah. Parlemen yang anggotanya berasal dari parpol sebagai faktor penentu dalam seleksi pejabat publik ternyata terjebak dalam pragmatisme kekuasaan dan korupsi sehingga gagal melahirkan pemimpin yang nasionalis, ideologis, dan negarawan. Pembenahan ini harus dilakukan secara konstitusi, sistemik dan komprehensif.

Artinya secara konstitusional harus dirancang peraturan atau undang-undang pemilu, parpol, atau peraturan lainnya yang konsisten untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan. Pada kenyataan parpol sebagai lembaga rekrutmen politik gagal melakukan pengkaderan secara berkesinambungan untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar mengakar pada kepentingan rakyat. Parpol cenderung melahirkan pemimpin hasil polesan pemilu. Makalah ini akan membahas tentang peran partai politik dalam rekrutmen politik dengan menitikberatkan pada konsep dualisme kepemimpinan di Indonesia.

B. Partai Politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa

sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Menurut definisi Chal Jfriedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.³²

Partai politik pertama kali lahir di Negara-Negara eropa barat bersamaan dengan gagasan, bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di lain pihak, namun dalam perkembangan selanjutnya partai politik di anggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, modern dan mewakili aspirasi rakyat. Namun bicara tentang keberadaan atau “eksistensi” dan “hegemoni” dalam hal ini eksistensi dan hegemoni organisasi politik atau partai politik di awal-awal pendiriannya masih bersifat elitis dan aristokrasi, dimana lembaga politik tersebut tentu hanya

³² Mariam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Cet 1. Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2008), h. 404.

mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, kemudian peranan tersebut meluas di lapisan masyarakat.

Partai politik ialah salah satu pilar demokrasi di Negara yang menganut paham demokrasi, artinya partai dalam negara demokrasi merupakan bagian dari ruh demokrasi, namun bila partai politik tidak berjalan sesuai dengan mekanisme atau fungsi partainya, maka demokrasi akan mengalami kepincangan.

Menurut Carl j. Friedrich, bahwa partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil atau dengan maksud mensejahterakan anggotanya.³³

Tujuan partai politik adalah :

Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik adalah:

1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta partisipasi politik.
2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat.
3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.

³³ Muliansyah Abdurrahman Ways. Political, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik Dan Welfare State. (Cet. 1, Yogyakarta: Mantri Jeron. 2015), h. 131.

4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.

Adapun fungsi Partai Politik yang melekat dalam suatu partai politik adalah :

1. Sosialisasi politik adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa.
2. Partisipasi politik adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, platform, asas partai kepada anggota, masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya.
3. Komunikasi politik adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
4. Artikulasi kepentingan adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi) kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.
5. Agregasi kepentingan adalah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan

kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.

6. Pembuat kebijaksanaan adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislatif, setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

Persyaratan pendirian partai politik di Indonesia adalah :

Dalam pendirian suatu partai politik menurut pasal 2 UU No. 31 tahun 2002, tentang partai politik adalah meliputi :

- a. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga Negara RI yang telah berusia 21 tahun ke atas dengan akta notaris.
- b. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan tingkat Nasional.
- c. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan pada departemen kehakiman dengan syarat :
 - 1) Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan UUD 1945 Negara RI dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
 - 2) Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah kabupaten/kota pada setiap propinsi yang bersangkutan dan 25 % dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

- 3) Memiliki nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lainnya.
- 4) Memiliki kantor tetap.

Pasal 3 UU No 31 tahun 2002, tentang partai politik berbunyi :

- a. Departemen kehakiman HAM menerima pendaftaran pendirian partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- b. Pengesahan partai politik sebagai Badan Hukum dilakukan oleh Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam berita negara RI. Pasal 4 UU No 31 tahun 2002, tentang partai politik.

- c. yaitu: Dalam hal perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), nama, lambang, dan tanda gambar partai politik didaftarkan ke departemen kehakiman dan HAM.

C. Konflik

Konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antara kekuatan-kekuatan politik yang merebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar.³⁴ Pengertian konflik disini merujuk pada hubungan antara kekuatan politik ke kelompok dan individu yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya

³⁴ A. Rahman H.I. Sistem Politik Indonesia, (Cet. 1. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), h. 107-109.

menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok yang kecil maupun dalam suatu kelompok yang besar.

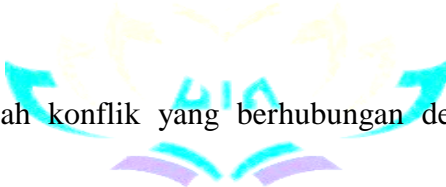
Perbedaan kepentingan setidaknya akan menunjukkan mereka berkonflik. Menurut Domhoff, motivasi seseorang untuk merebut kekuasaan, selain dia ingin berkuasa, mereka juga menginginkan uang, jaringan dan investasi strategis. Bentuk-bentuk investasi strategis bisa bermacam-macam baik dari segi kultural, ekonomi, politik, Konflik tidak dapat dihindari dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bernegara, termasuk aspek politik. Bentuk yang paling konkrit konflik dan proses adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah dalam proses penyelesaian konflik tersebut.

Pada beberapa kasus yang berhubungan dengan konflik politik di Indonesia, penyelesaiannya membutuhkan campur tangan pemerintah melalui produk-produk hukum yang berlaku. Misalnya, konflik politik antara partai politik, konflik antara pemerintah dengan kelompok masyarakat tertentu, sampai dengan konflik antara lembaga pemerintah.³⁵ Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, revalitas, dan konflik-konflik. Hal ini merupakan realitas sosial yang

³⁵ Muh. Irfan Idris, Sosiologi Politik. (Cet. 1. Makassar:Alauddin University Press, 2010), h.157.

terjadi di tengah masyarakat modern, karena masing-masing mempunyai interest, tujuan yang mungkin saling bertentangan.³⁶

Konflik merupakan bagian dari demokrasi, karena ciri tatanan demokrasi adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran konsensus, dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik secara damai, dan pembatasan kekerasan serta luasnya kepercayaan dan loyalitas terhadap pemerintah yang konstitusional dan demokratis. Dengan mengikuti penjelasan Ramlan Surbakti tentang pengertian politik, terdapat 5 penjelasan mengenai konflik politik yaitu :

- 
1. konflik politik adalah konflik yang berhubungan dengan pertentangan kepentingan publik .
 2. konflik politik adalah konflik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Secara vertikal, konflik dapat terjadi antara penyelenggara negara dan rakyat, terutama ketika rakyat merasa ditindas atau diperlakukan tidak adil. Secara horisontal, konflik dapat terjadi antara masyarakat pendukung penguasa dan masyarakat yang menginginkan pergantian kekuasaan.
 3. Konflik politik merupakan konflik yang terjadi akibat dari adanya perebutan kekuasaan. Dalam arti luas mencakup mencari, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan. Pengertian kekuasaan (Power) memiliki tiga dimensi, yaitu daya paksa (Force), pengaruh

³⁶ Rahman Arifin, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional. (Cet.1. Surabaya,SIC:2002), h. 184.

(Influence), dan wewenang (Authority). Oleh karena itu konflik politik akan melibatkan berbagai hal yang ada dalam dimensi kekuasaan tersebut.

4. Konflik Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Proses politik berlangsung dari adanya artikulasi dari masyarakat, kemudian diagregasikan untuk dimunculkan dalam tuntutan sebagai bagian dari input dalam proses politik. Jika lokal. memperoleh dukungan, tuntutan tersebut menjadi isu yang siap untuk diproses atau dirumuskan dalam kebijakan umum. Mengingat kepentingan masyarakat berbeda-beda perbedaan ini terkait dengan kebudayaan, lingkungan sosial, alam dan sebagainya tuntutan masyarakatpun menjadi beragam, dan keragaman itulah yang sering memunculkan konflik.
5. Konflik Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Dalam demokrasi pluralistik, negara/pemerintah merupakan wahana tempat terjadi interaksi kepentingan berbagai kelompok dan penetapan keputusannya. Perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan konflik karena setiap masyarakat menginginkan agar tuntutan-tuntutan yang penting bagi dirinya terpenuhi. Ketika kepentingan yang beragam tersebut saling bertabrakan, terjadilah konflik. Konflik juga terjadi ketika pelembagaan politik yang mengatur proses tersebut tidak mampu mengintegrasikan, menata hubungan kepentingan yang saling berbenturan,

dan memprosesnya dalam kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.³⁷

D. Elit Politik

Kajian ini membagi dua kategori elit dalam konteks lokal dan elit non politik

- a. Elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislative yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti: Gubernur, bupati, walikota, ketua DPRD, anggota DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik.
- b. Elit non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

Perbedaan tipe elit lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar elit politik maupun masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah di tingkat lokal. Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat factor penyebab, motif dan kepentingan-kepentingan politiknya. Pertama dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antara kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar.

³⁷ Muslim Mufti, Teori-Teori Politik. (Cet. 1. Bandung:Pustaka Setia, 2012), h. 158.

Pengertian konflik disini merujuk pada hubungan antara kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok yang kecil maupun dalam suatu kelompok yang besar, perbedaan kepentingan setidaknya akan menunjukan motif mereka berkonflik.

Menurut Domhoff, motivasi seseorang untuk merebut kekuasaan selain dia ingin berkuasa mereka juga menginginkan uang, jaringan dan investasi strategis. Bentuk-bentuk investasi strategis bias bermacam-macam baik dari segi kultural, ekonomi, politik, jaringan kekuasaan dan lain sebagainya. Umumnya, elit politik memiliki motif untuk menduduki jabatan-jabatan politik, karena keuntungan-keuntungan seperti itu. Karena kekuasaan sifatnya terbatas, dan menjadi perebutan berbagai kelompok, maka konflik pasti akan terjadi. Nuansa-nuansa pertentangan dalam sirkulasi elit setidaknya menunjukkan tingkat perbedaan kepentingan diantara kelompok-kelompok yang berbeda.³⁸

Berdasarkan gagasan pereto elit terbagi atas dua kelas yaitu elite yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Kelas elit yang pertama itu termasuk mereka yang secara langsung atau tidak langsung memegang peran penting dalam kehidupan pemerintahan dan politik. Kelas elit yang kedua terdiri dari sisanya, yaitu mereka

³⁸ Moch. Nurhasim, Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Cet.1. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2005), h. 12.

yang tidak memiliki peranan penting dalam pemerintah dan politik. Gagasan dasar dari Pareto ini sederhana tapi meyakinkan, yaitu bahwa orang dapat di ranking berdasarkan kepemilikan akan barang terwujud: kekayaan, kecakapan, atau kekuasaan politik. Pada hakekatnya orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya. Kaum elitis klasik umumnya berpendapat bahwa distribusi kekuasaan, hampir dalam segala hal dapat dipandang dalam artian dikotomis itu. Secara eksternal elit itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok-kelompok. Elit itu bukan merupakan suatu kumpulan individu-individu yang saling terpisah atau sekedar merupakan penjumlahan orang-orang saja. Tetapi sebaliknya seperti halnya anggota-anggota klub khusus dan terbatas, individu-individu yang ada dalam kelompok elit itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip dan (walaupun mungkin memiliki pandangan yang berbeda) memiliki nilai-nilai, kesetiaan dan kepentingan yang sama. Untuk ini ada yang mengatakan kelompok elit itu memiliki “tiga K” yaitu kesadaran, keutuhan, dan kebulatan tujuan kelompok.

Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas (exclusive). Pemimpin-pemimpin selalu memilih sendiri penggantinya dari kalangan istimewa yang hanya terdiri dari beberapa orang. Kelompok elit itu pada hakekatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai

keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok ini.³⁹



³⁹ Mohtar Mas' oed, *Perbandingan Sistem Politik*. (Cet. 18, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. 2008), h. 96.

BAB III

PROFIL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah;

- ❖ KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
- ❖ H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); * Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
- ❖ Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
- ❖ Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah

menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Mukhtamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Mukhtamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Mukhtamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah *Subhanahu Wata'ala*.”

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.

Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja

mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP.

Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH.

Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.

1. Pada Pemilu 1977 PPP meraih 18.745.565 suara atau 29,29 persen). Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP mendapatkan 99 kursi atau 27,12 persen dari 360 kursi yang diperebutkan.

2. Pada Pemilu 1982 PPP meraih 20.871.800 suara atau 27,78 persen. Dari perolehan kursi, PPP mendapatkan 94 kursi atau 26,11 persen dari 364 kursi yang diperebutkan.
3. Pada Pemilu 1987 PPP meraih 13.701.428 suara atau 15,97 persen. Sedangkan dari perolehan kursi, PPP meraih 61 kursi atau 15,25 persen dari 400 kursi yang diperebutkan.
4. Pada Pemilu 1992 PPP meraih 16.624.647 suara atau 14,59 persen. Dari sisi perolehan kursi PPP meraih 62 kursi atau 15,50 persen dari 400 kursi yang diperebutkan.
5. Pada Pemilu 1997 PPP meraih 25.340.018 suara. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 89 kursi atau 20,94 persen dari 425 kursi yang diperebutkan.
6. Pada Pemilu 1999 PPP meraih 11.329.905 suara atau 10,71 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 58 kursi atau 12,55 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.
7. Pada Pemilu 2004 PPP meraih 9.248.764 atau 8,14 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP tetap meraih 58 kursi atau 10,54 persen dari 550 kursi yang diperebutkan.
8. Pada Pemilu 2009 PPP meraih 5,5 juta suara atau 32 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan.

Daerah yang memberikan kontribusi perolehan kursi atau sebaliknya tidak memberikan kontribusi kursi bagi PPP adalah:

1. Pada Pemilu 1977, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 84,62 persen dari 26 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.
2. Pada Pemilu 1982, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur.
3. Pada Pemilu 1987, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur.
4. Pada Pemilu 1992, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.
5. Pada Pemilu 1997, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.
6. Pada Pemilu dipercepat tahun 1999, PPP meraih kursi pada 24 provinsi atau 88,88 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Bali, Irian Jaya, dan Timor Timur.

7. Pada Pemilu 2004, PPP meraih kursi pada 23 provinsi atau 69.69 persen dari 33 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Babel, Kepri, DIY, Bali, NTT, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua.

Selama Pemilu yang diselenggarakan pemerintahan otoriter Orde Baru, PPP selalu berada dalam keadaan tertindas. Kader-kader PPP dengan segala alat kekuasaan Orde Baru dipaksa meninggalkan partai, kalau tidak akan dianiaya. Kalau seniman, tokoh PPP itu tidak akan bisa “manggung” di TVRI, satu-satu stasiun televisi yang dikontrol Pemerintah. Hal ini dialami oleh H. Rhoma Irama, Bajuri yang kini dikenal Mat Solar Sopir Bajaj, dan lain-lain. Selama masa Orde Baru banyak kader-kader PPP terutama di daerah yang ditembak, dipukul, dan malah ada yang dibunuh. Saksi-saksi PPP diancam, suara yang diberikan rakyat ke PPP dimanipulasi untuk kemenangan Golkar, mesin politik Orde Baru. Jadi kalau ada yang menyatakan PPP adalah bagian dari Orde Baru sangat tidak beralasan.

Namun ada fakta yang terbantahkan bahwa dalam Pemilu 1999, 2004, dan 2009 suara PPP selalu turun. Ini merupakan tantangan bagi kepengurusan PPP yang dihasilkan dalam Muktamar VII/2011. Akankah dalam Pemilu 2014 nanti PPP akan Berjaya atau sebaliknya akan punah? Pengurus PPP Masa Bakti 2011-2014, juga kader-kader di era itu, akan memikul dosa sejarah yang tak akan termaafkan jika pada 2014 nanti PPP terkubur.

Untuk meraih kembali kejayaannya, PPP memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.” Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP 2011-2015, Lukman Hakim Saifuddin, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat Pleno DPP PPP 2011-2015, 21-22 Oktober 2011 di Jakarta, setidaknya-tidaknya ada tiga pengertian dari “PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam”, yaitu:

Pertama, PPP merupakan tempat kembalinya orang Islam, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya. Sebagaimana kita maklumi, di era reformasi banyak eksponen PPP yang pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru. Selain itu, banyak organisasi Islam yang merupakan pendiri atau pendukung PPP yang memberikan dukungan kepada partai politik baru. Namun, di rumah baru itu banyak eksponen PPP yang mengalami kekecewaan. Nah, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi mereka yang telah meninggalkan PPP untuk kembali lagi berjuang bersama PPP dalam menyalurkan aspirasi umat Islam serta menindaklanjutinya.

Kedua, PPP merupakan tempat bernaung atau berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita maklumi, PPP merupakan partai yang paling gigih memperjuangkan aspirasi umat Islam dari berbagai macam langkah-langkah berbagai kalangan yang merugikan umat Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sejak PPP berdiri sampai kini. Sebagai kompensasi atas berdirinya PPP sebagai partai Islam, maka PPP meredam keinginan sebagian umat Islam itu sendiri untuk mendirikan negara Islam atau mengganti Pancasila dengan asas Islam, karena ternyata dalam negara Pancasila masih dimungkinkan berdirinya partai Islam yang mempunyai kebebasan memperjuangkan aspirasi umat Islam

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, keberadaan PPP dalam konteks NKRI sangat penting.

Ketiga, PPP merupakan tempat untuk menyatukan aspirasi umat Islam dan menindaklanjutinya, sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari sisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, pernyataan “PPP sebagai rumah besar umat Islam” merupakan penegasan bahwa PPP merupakan hasil fusi atau gabungan dari beberapa partai politik Islam melalui sebuah deklarasi bersama pada 5 Januari 1973 (Miladiyah) bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1392 (Hijriyah). Jadi, kekuatan utama PPP terletak pada kemampuannya untuk membangun dan menggalang kebersamaan di antara partai politik Islam yang melakukan fusi dalam PPP.

Banyak yang berpandangan bahwa PPP hanya didirikan oleh 4 partai politik saja, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Pandangan itu secara *de jure* dan *de facto* salah besar. Secara *de jure*, AD/ART PPP tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu sebagai pendiri PPP. AD/ART hanya menyebut bahwa PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik.⁴⁰ Ini berarti paratokoh yang merumuskan Mukaddimah AD/ART itu

⁴⁰ Alinea kedua Mukaddimah AD/ART menyatakan: “Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata’ala*, partai-partai politik yang berasas

yang sejak dulu sampai kini tidak pernah diubah secara substansial menyadari bahwa selain empat partai politik yang berfusi itu, masih ada organisasi Islam yang menjadi pendukung dari keempat partai politik itu yang harus dimasukkan sebagai pendiri PPP.

Masih secara *de jure*, *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP juga tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu sebagai pendiri PPP, melainkan menyebutnya sebagai pihak yang mendeklarasikan PPP.⁴¹ Deklarasi berasal dari kata *declare* yang berarti mengumumkan, menjelaskan, menyatakan, atau melaporkan. Ini berarti *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP juga menegaskan bahwa pendiri PPP tidak hanya terbatas pada deklarator saja, melainkan di balik itu masih ada organisasi Islam yang turut mendukung deklarasi itu, sehingga deklarasi itu bisa terlaksana dengan baik.

Masih secara *de jure* juga, Keputusan Presiden No. 70 Tahun 1968 yang mengesahkan pendirian Parmusi juga menegaskan bahwa pendiri partai politik ini adalah 16 organisasi Islam yaitu Muhamamdiyah, Jami'atul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), Persatuan Islam (Persis),

Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.”

⁴¹ Dalam *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP dikatakan: “Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan...”

Nahdlatul Wathan, Mathla'ul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Wanita Islam. Setelah Parmusi bergabung dengan PPP, maka pendiri Parmusi secara otomatis juga merupakan pendiri PPP.

Hanya saja karena sebagian besar organisasi Islam pendiri Parmusi itu lebih mengonsentrasikan diri pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sementara AD/ART dan *Khitthah* Program Perjuangan PPP berbicara dalam konteks politik, maka wajar jika yang dinyatakan secara eksplisit hanya partai Islam yang telah diakui sebagai partai politik, yaitu Partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti.

Ringkasnya, secara *de jure* deklarator PPP adalah 4 partai politik. Namun pendiri PPP adalah hampir seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah.

Selain itu secara *de facto*, klaim bahwa PPP merupakan rumah besar umat Islam akan terwujud jika dua puluh organisasi Islam itu yaitu 4 partai politik yang menjadi deklarator serta 16 organisasi Islam yang menjadi pendukung deklarator memberikan mandate kepada PPP untuk menyalurkan aspirasinya. Begitu pula sebaliknya, jika kedua puluh organisasi Islam itu tidak memberikan dukungan kepada PPP, maka klaim PPP sebagai rumah besar umat Islam hanya pepesan kosong belaka.

Secara *de facto* juga, ketika PPP mendapat dukungan dari dua puluh organisasi Islam itu, PPP berhasil menorehkan sejarah, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Bersama organisasi Islam, PPP menjadi partai politik yang gigih memperjuangkan kepentingan politik umat Islam, dengan segala macam risiko, seperti penahanan, intimidasi, dan bahkan siksaan. Itu semua dilakukan oleh aktivis PPP karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan perintah Allah *Subhanahu Wata'ala* serta sesuai dengan aspirasi umat Islam dan organisasi Islam.

Konsekwensi politik dari kenyataan itu adalah fungsionaris PPP di tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, dan ranting harus meningkatkan hubungannya dengan partai Islam yang menjadi deklarator serta dengan organisasi Islam yang mendukung atau mendirikan partai deklarator PPP itu. Ini penting agar PPP tidak kehilangan orientasi dan pijakan sejarahnya.

Selain itu, fungsionaris PPP sesuai dengan tingkatannya tidak perlu ragu-ragu untuk mengangkat aktivis organisasi Islam sebagai pengurus PPP, sehingga PPP betul-betul dapat menyuarakan kepentingan umat Islam karena dikawal oleh orang-orang yang paham akan aspirasi dan perjuangan umat Islam Indonesia. Bahkan, fungsionaris PPP di berbagai tingkatannya harus memberikan ruang kepada organisasi Islam untuk dicalonkan oleh PPP sebagai anggota DPR/DPRD bahkan juga sebagai pejabat publik lainnya.

PPP tidak boleh hanya terpaku pada “kader jenggot” yaitu kader yang hanya terpampang namanya sebagai pengurus PPP, namun dalam praktiknya tidak

pernah memberikan sumbangsih kepada PPP. Lebih baik mencalonkan aktivis organisasi Islam sebagai pejabat publik yang telah memberikan sumbangsih kepada organisasi Islamnya daripada mencalonkman kader PPP tidak jelas modal sosial dan sumbangsihnya kepada Islam dan umat Islam. Al-Qur'an menyatakan: *khairun nas, anfa'uhum lin nas*. Kalau diterjemahkan dalam konteks pencalonan, sebaik-baiknya orang yang berhak dicalonkan sebagai pejabat publik oleh PPP adalah orang yang memberikan sumbangsih besar kepada umat Islam, baik melalui PPP atau melalui organisasi Islam lainnya.

Dengan modal sejarah itu seharusnya pengurus PPP di berbagai tingkatan dapat menghimpun dan merangkul seluruh potensi dan kekuatan umat Islam Indonesia dalam rangka menegakkan perjuangan para pahlawan yaitu menciptakan *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur* (Negara yang adil makmur). Kader-kader PPP tidak boleh egois dengan menjadikan PPP sebagai miliknya sendiri, lalu menghalangi masuknya kader umat terbaik yang belum sempat bergabung dengan PPP. Jika hal ini terjadi, maka kader itu telah melupakan sejarah PPP bahwa PPP adalah milik seluruh umat Islam, sehingga seluruh umat Islam juga kader PPP. “Jasmerah, Jangan sekali-kali melupakan sejarah,” demikian pesan Bun Karno.

B. Visi dan Misi Prinsip Dasar PPP

1. Visi

Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi

harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

2. Misi

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

C. Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan

Pada penjelasan AD/ART PPP Pasal 10 tentang Daerah Partai Persatuan Pembangunan ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di susun sesuai dengan susunan daerah pemerintahan, yaitu:

- a. Di tingkat Nasional berkedudukan di Ibu kota Negara, di sebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPP PPP

- b. Di tingkat Provinsi, berkedudukan di ibu kota Provinsi di sebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPW PPP
- c. Di tingkat Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ Kota, di sebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPC PPP
- d. Di tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Desa/Kelurahan disebut Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan di singkat PR PPP



BAB IV

DUALISME KEPEMIMPINAN PARTAI POLITIK

A. Gambaran Dualisme Kepemimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan Terhadap DPC PPP Kota Bandar Lampung

1.1 Awal Mula Konflik “Klaim Sepihak Surya dharmah aliDharma Ali”

Saat Koalisi terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan di internal partai berlambang Ka'bah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan berawal dari kedatangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan pada tanggal 23 Maret 2014. Menurut Kepengurusan Fersi, kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur Parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan kader PPP di mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional II PPP di Bandung.

“konflik berawal dari penetapan suryadharma ali sebagai tersangka oleh KPK dan sebagaimana yang terdapat dalam AD/ART partai bahwasanya itu melanggar AD/ART partai dan sudah semestinya suryadharma ali diberhentikan namun keserakaan surya dharma ali yang tidak mau melepaskan jabatan ketuanya itu yang menjadi persoalan tanggassnya”.⁴²

⁴² Wawancara bersama pihak DPC PPP Kota Bandar Lampung Ketua dan sekretaris, bapak Busairi, S.E dan H.Hambali Sanusi beliau menyatakan seperti itu.

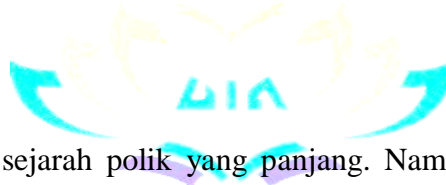
Kerakusan Surya Dharma Ali tersebutlah terjadinya Muktamar di Surabaya dan Pondo Gede sambungnya lagi, yang sebagaimana penulis juga akan menjabarkannya juga pada bahasan selanjutnya. Semakin sedikit posisi atau sumber yang dapat diraih setiap anggota atau kelompok dalam organisasi politik, makin tajam konflik dan persaingan di antara mereka untuk merebut posisi dan sumber itu. Selanjutnya, dikatakan di dalam hirarki sosial dimanapun hanya ada sejumlah terbatas posisi sosial kekuasaan yang nyata dan tidak lebih dari seseorang yang dapat mendudukinya.⁴³

Dari keterangan pasal 12 huruf e jelas Surya Dharma Ali sudah melakukan pelanggaran AD/ART partai, diterangkan dalam pasal 13 ayat 5 menyatakan setiap anggota sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e yang telah dinyatakan bersalah dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in-kracht) dikenakan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota.⁴⁴ Menurut analisi penulis tentang latar belakang dari tokotokoh PPP yang berkonflik pada 2014-2016, berlatar belakang dari Nahdatul Ulama. Drs. H. Surya dharma Ali, M.Si. pernah menjabat sebagai Ketua PMII Periode 1985-1988, sebagaimana diketahui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlusssunnah wal Jama'ah. pengurus harian (RPH) DPP PPP pada

⁴³ Hasil wawancara dengan Nursyamsi, S.T Ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung (kubu djan faridz)

⁴⁴ Dalam AD/ART PPP, ketetapan muktamar VIII PPP 2006 pasal 12 dan 13

Rabu 10-9-2014 memutuskan memecat Suryadharma Ali dari Jabatan Ketua Umum. Pemecatan itu dilakukan karena Suryadharma Ali tidak segera mundur meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi haji. Padahal dalam ketentuan AD ART PPP, Ketua Umum dapat diberhentikan hanya pada saat Mukhtamar berlangsung, bukan disaat rapat-rapat harian, selain dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Keputusan ini diambil karena Suryadharma Ali dinilai telah meruntuhkan citra partai, sehingga diberhentikan. Namun, Suryadharma Ali tidak terima bermanuver balik dengan memecat tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M. , Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi.



PPP telah melalui sejarah politik yang panjang. Namun tubuh Partai ini ternyata sangat miskin dengan sosok yang bisa dijadikan teladan yang bisa menyatukan anasir-anasir politik Islam. Salah satu penyebab ketiadaan figur pemimpin inilah yang membuat kuatnya intervensi penguasa untuk memecah belah persatuan dan kesolidan PPP melalui sosok pimpinan baru yang direkasaya dengan sangat sangat matang.

1.2. Konflik Dalam Internal Partai Persatuan Pembangunan

Mukhtamar Surabaya

Pelaksanaan Mukhtamar VIII PPP yang digelar oleh Kepengurusan Fersi di Empire Hotel, Surabaya, dan ditutup pada Jumat 17-10-2014. Mukhtamar ini menghasilkan tujuh keputusan politik yang menjadi pandangan politik lima tahun ke depan dari partai berlambang Kabah ini. Pertama, PPP secara tegas

menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dukungan itu dinilai sejalan dengan prinsip PPP, yaitu amar ma'ruf nahi munkar.

Kedua, PPP mengajak semua elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat Pemilihan Umum Presiden 2014, lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan Negara.

Ketiga, Usman menyebutkan, PPP mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sehingga pemilihan umum kepala daerah dapat dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta bebas dari politik uang.

Keempat, PPP mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada rakyat, dan meningkatkan pelayanan administrasi terkait pertahanan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Kelima, PPP mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan dasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur. Untuk yang keenam, PPP mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada Madrasah dan Pondok Pesantren. Perhatian juga diberikan terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia.

Ketujuh, PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai Hari Santri yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November.⁴⁵

Muktamar Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 Kepengurusan Fersi Suryadharma Ali menggelar Muktamar VIII di Jakarta atas usulan dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Maimun Zubair untuk mengatasi konflik internal partai berlambang Ka'bah. Hasilnya Djan Faridz terpilih menjadi Ketua Umum PPP. Kepengurusan Fersi Djan Faridz mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan. Hasilnya pada November 2014 PTUN mengeluarkan putusan sela yang meminta pelaksanaan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPP PPP pada tanggal 28 Oktober 2014 ditunda. Artinya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly diwajibkan untuk menunda pengesahan kepengurusan DPP PPP.⁴⁶

Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII ini dinilai over load. sebab ada 3 kepengurusan muktamar PPP yang ditampung oleh Muktamar ini. "Karena ini

⁴⁵<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/13054851/Resmi.Ditutup.Ini.Hasil.Muktamar.VIII.PPP.di.Surabaya.> (pernyataan Romahurmuzy pada media Kompas)

⁴⁶<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/13054851/Resmi.Ditutup.Ini.Hasil.Muktamar.VIII.PPP.di.Surabaya.>

ada tiga pihak, (Muktamar) Surabaya, Jakarta dan Bandung. Jadi masing-masing sepertiga," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat 22-4-2016. Romi telah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar VIII PPP yang digelar 8-10 April di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dia dipilih secara aklamasi setelah peserta Muktamar Islah itu sepakat melakukan pemilihan dengan cara musyawarah mufakat.

Pimpinan PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz dan loyalisnya sama sekali tak hadir dalam Muktamar itu. Djan menilai kehadiran pada ajang Islah sebagai sebuah kesalahan apa lagi bila dia bergabung dengan kepengurusan Romi. Muktamar VIII PPP merupakan forum Islah dari konflik PPP yang berkepanjangan, telah melahirkan semangat baru buat para kader partai berlambang Ka'bah .²⁹ Ketua Umum terpilih hasil Muktamar VIII yakni , bersama sembilan formatur yang dipilih para Mukdamirin, sedang merampungkan susunan kepengurusan PPP priode 2016-2021, dengan konsep mengakomodir berbagai pihak dengan berbagai latar belakang, khususnya pihak-pihak yang berbeda pendapat dan beberapa tokoh nasional yang selama ini dikenal baik kredibilitasnya.⁴⁷

⁴⁷ Pernyataan Fadly Nursal yang merupakan salah seorang dari sembilan tim Formatur, kepada wartawan, Senin 18/4/2016 di Gedung DPR Jakarta yang di muat dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/18/masih-digodok-pengurus-dpp-ppphasil-muktamar-vii> dikutip Rabu 16 08 2017 jam 07:00 Wib

B. Dampak Dualisme Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan kepada DPC Kota Bandar Lampung

Dari dua Musyawrah PPP yaitu Mukhtar Surabaya dan Mukhtar Jakarta yang sebagaimana di jelaskan di atas PPP melahirkan dua keputusan yang berbeda pula Kepengurusan Fersi dan Suryadharma Ali saling serang terkait Mukhtar VIII PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Kedua Kepengurusan Fersi itu menuding Mukhtar yang dilakukan baik di Surabaya ataupun di Jakarta adalah ilegal karena sesuai dengan AD/ART partai. Mukhtar VIII menyatakan Djan Faridz sebagai Ketum PPP periode 2014-2019. Dampak dualisme partai persatuan pembangunan tidak hanya selesai di tingkat DPP melainkan berimbas hingga di seluruh daerah di Indonesia termasuk DPC Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung.

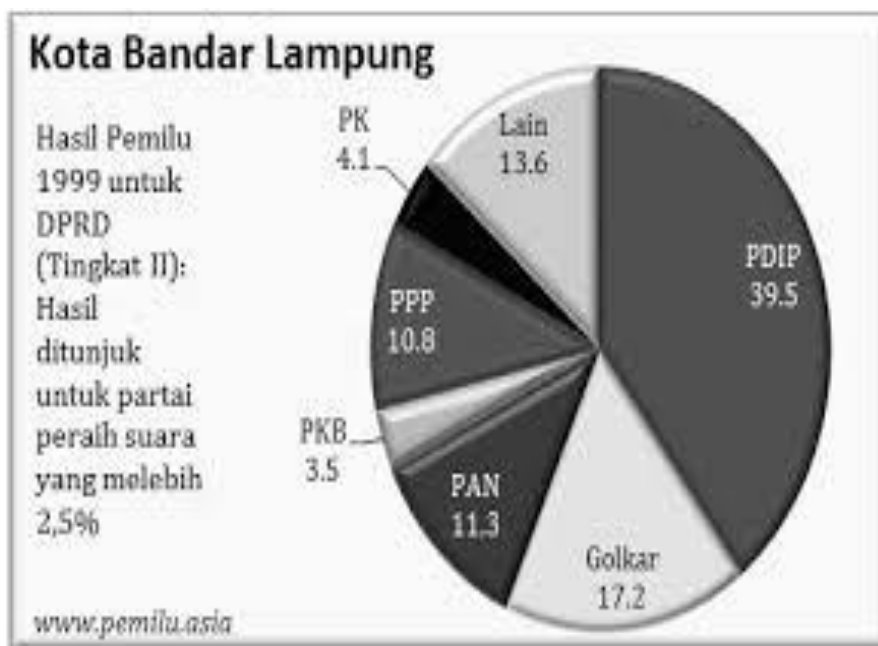
Bermula dari surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPC) PPP Lampung Mc Imam Santoso atau Wiwik, panggilan akrabnya, dari struktur kepengurusan partai berlambang kakbah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan surat keputusan (SK) DPP No : 161/SK/DPP/P/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 yang ditandatangani langsung Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuziy dan Sekretaris H. Arsul Sani, S.H tentang pemberhentian Mc Imam Santoso dari jabatannya sebagai ketua pengurus harian DPC PPP. karena pihak DPP PPP menilai Mc Imam Santoso ini melakukan tindakan indisipliner dan mencoba melakukan perbuatan yang membangkang oleh

kebijakan partai. status jabatan Mc Imam Santoso sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung akan dicopot melalui mekanisme pergantian antar waktu.

Sejak keluarnya SK pergantian ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung Kepengurusan Fersi Romahurmuziy (Romy) kembali mengeluarkan surat keputusan (SK) pergantian pengurus DPD kabupaten/kota. Salah satunya, DPD [PPP](#) Kota [Bandar Lampung](#). Yakni Busyairi, SE dan pengurus (Kepengurusan Fersi romahurmuzi) sebagai ketua DPD PPP Kota Bandar Lampung yang sah menggantikan Nursyamsi, ST dan pengurus (Kepengurusan Fersi Djan Faridz).⁴⁸



Tabel 1
Hasil Pemilu 1999 DPRD Kota Bandar Lampung



⁴⁸ Busyairi, SE Ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung 20 Juni 2018 pukul 15.15 WIB.

Tabel 2
Hasil Pemilu 2004 DPR-RI

NO. URUT	NAMA PARPOL	JUMLAH SUARA	%	KATEGORI PARPOL
1.	PNI	923,159	0.81%	NON PT
2.	PBSD	636,397	0.56%	NON PT
3.	PBB	2,970,487	2.62%	PT
4.	MERDEKA	842,541	0.74%	NON PT
5.	PPP	9,248,764	8.15%	PT
6.	PDK	1,313,654	1.16%	NON PT
7.	PIB	672,952	0.59%	NON PT
8.	PNBK	1,230,455	1.08%	NON PT
9.	DEMOKRAT	8,455,225	7.45%	PT
10.	PKPI	1,424,240	1.26%	NON PT
11.	PPDI	855,811	0.75%	NON PT
12.	PNUI	895,610	0.79%	NON PT
13.	PAN	7,303,324	6.44%	PT
14.	PKPB	2,399,290	2.11%	NON PT
15.	PKB	11,989,564	10.57%	PT
16.	PKS	8,325,020	7.34%	PT
17.	PBR	2,764,998	2.44%	NON PT
18.	PDIP	21,026,629	18.53%	PT
19.	PDS	2,414,254	2.13%	NON PT
20.	GOLKAR	24,480,757	21.58%	PT
21.	PANCASILA	1,073,139	0.95%	NON PT
22.	PSI	679,296	0.60%	NON PT
23.	PPD	657,916	0.58%	NON PT
24.	PELOPOR	878,932	0.77%	NON PT
JUMLAH		113,462,414	100%	

Tabel 3

Hasil Pemilu 2009 dan 2014 DPRD Kota Bandar Lampung

Perolehan Suara Partai Pemilu 2014 dan 2009

Partai	2009 (data KPU)	2014 (hasil hitung cepat)
Nasdem		6,8
PKB	4,4	9,3
PKS	7,8	6,9
PDIP	14,0	19,1
Golkar	14,4	14,4
Gerindra	4,4	11,8
Demokrat	20,8	9,6
PAN	6,0	7,4
PPP	5,3	6,6
Hanura	3,7	5,4
PBB	1,8	1,6
PKPI	0,9	1.1

Sumber : Data KPU 2014

Tabel 4 Perolehan Kursi

- *** 2009 MENDAPAT 4 KURSI DARI 5 DAPIL**
1. ALBET ALAM 2.
HENDRI KISINJER 3.



C. Dualisme Kepemimpinan dalam Sudut Pandang Islam

Presiden, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin lain ke bawah hanya boleh ada satu dalam sebuah periode kepemimpinan dan dalam sebuah teritorial. Tidak boleh ada matahari kembar atau bahkan lebih dari dua matahari secara syariat sebagaimana keterangan Imam Al-Mawardi berikut ini:

Artinya, “Adapun pengangkatan dua atau tiga pemimpin pada periode pemerintahan yang sama dan untuk wilayah teritorial yang sama tidak boleh menurut ijmak ulama.

Imam Al-Mawardi mengutip pandangan mayoritas ulama bahwa pengangkatan dua pemimpin atau lebih di satu periode kepemimpinan dilarang dalam agama. Mereka mendasarkan pandangannya pada hadits Rasulullah SAW berikut ini:

Artinya, “Mayoritas ulama mengatakan bahwa pengangkatan dua pemimpin pada periode pemerintahan yang sama tidak boleh menurut syariat Islam karena ada riwayat hadits dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia bersabda, ‘Jika dua pemimpin dibaiat, maka bunuhlah salah satunya, (Imam Al-Mawardi).⁴⁹

Larangan Islam atas keberadaan matahari kembar jelas menyebabkan Pertarungan karena adanya dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan jelas menyebabkan Keributan karena adanya dua orang pemimpin yang memiliki kewenangan dan otoritas yang sama. Kita sulit membayangkan bagaimana jika terdapat lebih dari dua pemimpin yang memiliki otoritas yang sama dalam periode kepemimpinan yang sama. Sejarah juga membuktikan bahwa dualisme

⁴⁹ Imam Al-Mawardi, *Adabud Dunia wad Din*, (Beirut, Darul Fikr: 1992 M/1412 H], halaman 97)

kepemimpinan berujung pada perebutan pengaruh dengan segala cara, Keributan atau kacau-balau. Pasalnya, dalam dualisme kepemimpinan tentu terdapat konflik kepentingan yang hampir tidak mungkin didamaikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahaya dualisme kepemimpinan dengan mengingatkan agar menciptakan kondisi kepemimpinan tunggal dengan cara mematuhi seorang pemimpin yang sah di zamannya.

Artinya, “Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia bersabda, ‘Jika kalian mengangkat Abu Bakar RA, niscaya kalian akan menemukan pemimpin yang kuat dalam agama Allah SWT dan lemah fisiknya. Tetapi jika kalian mengangkat Umar RA, niscaya kalian mendapati orang yang kuat agamanya dan kuat fisiknya. Sedangkan jika kalian mengangkat Ali RA, niscaya kalian menemukan pemimpin yang dapat memberi petunjuk dan pemimpin yang mendapat petunjuk (dari Allah), Imam Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi, hadits ini memberikan amanat secara tersurat bahwa pengangkatan dua atau bahkan lebih pemimpin dilarang dalam agama karena mudharatnya akan berpulang kepada semua pihak, termasuk masyarakat umum.

Artinya, “Dengan hadits tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pengangkatan mereka sekaligus sebagai pemimpin dalam satu periode kepemimpinan tidak sah. Andaikata pengangkatan mereka sekaligus itu sah, niscaya Rasulullah SAW memberi isyarat dan mengingatkan.

Islam menghendaki umatnya bersatu dalam jamaah dan satu pemimpin. Karena itulah, Islam melalui lisan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan

sanksi berat terhadap upaya yang mengarah kepada dualisme kepemimpinan. Hal ini tampak dalam hadits-hadits berikut:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ، وَتَمَرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطِعهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

Barang siapa telah membaiai imam serta memberikan kesetiaan dan loyalitas kepadanya, maka hendaklah dia menaatinya semampu mungkin, kemudian bila datang orang lain yang menyainginya maka penggallah lehernya.” (Riwayat Muslim).

إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Bila dilakukan baiat kepada dua khalifah, maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya.” (Riwayat Muslim).

سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرِقَ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَانِنًا مَنْ كَانَ

“Akan terjadi kekacauan dan kekacauan, barang siapa ingin memecah persatuan umat ini sedangkan umat itu sedang bersatu, maka penggallah lehernya dengan pedang siapa pun orangnya.” (Riwayat Muslim).

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

“Barang siapa datang kepada kalian sedangkan urusan kalian itu bersatu di bawah kepemimpinan seorang pria, dan ia ingin membelah tongkat (kepemimpinan) kalian atau memecah barisan kalian, maka bunuhlah.” (Riwayat Muslim).

Para ulama menetapkan kaidah-kaidah yang jelas pula dalam perkara ini.

Al-Mawardi berkata, “Dan bila kepemimpinan disematkan kepada dua imam di dua negeri, maka kepemimpinan mereka itu tidak sah, dikarenakan tidak boleh bagi umat ini ada dua imam di waktu yang sama.”⁵⁰

Al-Qurthubi menjelaskan alasan pelarangan tersebut, “Ini adalah dalil yang paling jelas menunjukkan larangan pengangkatan dua imam, karena itu bisa

⁵⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hal: 9

menyebabkan timbulnya kemunafikan, perselisihan, perpecahan, kekacauan dan lenyapnya kenikmatan. Namun, menurut Al-Qurtubi juga dan beberapa ulama lain, dualisme kepemimpinan dibolehkan bila wilayahnya berjauhan dan dipisahkan oleh perjalanan yang jauh. Tetapi, Al-Juwaini melihat kebolehan ini berada di luar permasalahan yang telah pasti hukumnya.⁵¹

Para ulama mazhab kami berpendapat pelarangan penyematan imamah kepada dua orang di semua penjuru dunia, sedangkan menurut saya bahwa penyematan imamah kepada dua orang di satu wilayah yang berdekatan itu tidak boleh dan ijma telah terjalin terhadap hal itu. Adapun bila jaraknya berjauhan dan dua imam itu dipisahkan oleh perjalanan yang sangat jauh, maka di dalam hal itu ada kemungkinan (boleh). Dan ini di luar permasalahan yang qath'i.⁵²

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sudut pandang islam terhadap dualisme kepemimpinan partai persatuan pembangunan sangat berdampak buruk, karena menimbulkan kekacauan, perpecahan, fitnah, tercerai berainya persatuan dan kesatuan pengurus dan anggota partai. Apalagi partai pesatuan pembangunan memiliki azas islam dan salah satu partai islam yang memiliki sejarah panjang dalam pembangunan dan persatuan serta kesatuan Indonesia.

⁵¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, 1/273

⁵² Al-Juwaini, *Al Irsyaad Ilaa Qawathii'il Adillah Fi Ushulil I'tiqad*, hal: 425

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Konflik berlarut-larut karena Surya dharmah ali tidak terimah akan pemecatan dirinya, saat Romahurmuzuiy melakukan Mukhtar di Surabaya pihak Surya Dharmah Ali yang didalangi oleh Djan Farizd juga melakukan Mukhtar di di Hotel Grand Sahid jaya Jakarta. Menghasilkan dua putusan berbeda dan mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam PPP. Mukhtar PPP selalu identik dengan konflik yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, ideologi, kebijakan dan kepemimpinan. Karena PPP terbentuk dari fusi Partai Islam (NU, PERMUSI, PSII, DAN PERTI). Namun dalam konflik yang terjadi pada 2014-2016 bukanlah dikarenakan ideologi.
2. Dari analisis penulis ketiga tokoh yang berkonflik berasal dari Nahdatul Ulama yang mempunyai basis ideologi yang sama. Konflik yang terjadi pada 2014-2016 dikarenakan krisis kepemimpinan, PPP kehilangan figur. Semenjak ditinggal Kiai Bisri Sjansuri PPP berulang kali dilanda konflik, ketika Kian Bisri masi menjabat sebagai ketua Majelis Syuro partai, konflik masih bisa terelakan karena kepemimpinan partai tunduk kepa da Majelis Syuro. Penyelesaian konflik PPP yang terjadi pada tahun 2014-2016 melalu cara yang sesuai dengan AD/ART PPP yaitu Islah dan Mukernas, namun tidak berhasilnya dengan cara tersebut membuat PPP harus menempuh jalur Hukum.

3. Organisasi Partai Politik merupakan dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, suda seharusnya kekompakan merupakan faktor terpenting untuk mencapai suatu tujuan. Namun berbeda dengan PPP, hampir tidak ada kerja sama di dalamnya, sehingga konflik bagian dari citra partai ini.
4. Sikap elite PPP dalam berkonflik seharusnya bisa mengedapkan Islah sebagai serana penyelesaian konflik tampak adanya intervensi pemerintah dalam partai, saatnya bagi PPP mengedapkan Visi Misi sebagai tujuan dari suatu organisai Partai Politik, dan setiap pimpinan dan para kader partai mematuhi AD/ART partai sebagai landasan hukum suatu organisasi.
5. PPP memerlukan figur yang bisa dipercayaaai oleh setiap kadernya agar bisa menjadi panutan oleh setiap kadernya, Dan berpegang teguh pada asas Islam yang tercantum pada AD/ART, sehingga bisa meminilisir kebutuhan elite PPP akan patronase.
6. PPP harus lebih bekerja keras untuk meraih kepercayaan masyarakat dan membuktikan jikalau PPP memang sebagai rumah besar bagi umat Islam untuk menyongsong pemilihan umum yang akan datang.
7. kantor DPC PPP kota Bandar Lampung tampak sepi dari aktifitas pengurus.
8. DPC PPP kota bandar lampung tidak bisa ikut serta mengusung calon kepala daerah pada pemilihan wali kota bandar lampung dan gubernur lampung karena partai dalam keadaan konflik internal dan dualisme kepengurusan.
9. Perolehan kursi DPRD kabupaten/ kota mengalami penurunan yang sangat derastis pada pemilu legislatif 2019

10. Tidak solitnya kader partai PPP di bandar lampung menjadi terpecah.
11. Kurangnya kegiatan kegiatan yang berbasis kegiatan partai seperti pengajian rutin kader PPP, tahlilan, yasinan dan peringatan hari besar islam dimana PPP yang di dominasi warga nahdiyin.

B. SARAN

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan:

1. Organisasi Partai Politik merupakan dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, suda seharusnya kekompakan merupakan faktor terpenting untuk mencapai suatu tujuan. Namun berbeda dengan PPP, hampir tidak ada kerja sama di dalamnya, sehingga konflik bagian dari citra partai ini.
2. Sikap elite PPP dalam berkonflik seharusnya bisa mengedapkan Islah sebagai serana penyelesaian konflik tampak adanya intervensi pemerintah dalam partai, saatnya bagi PPP mengedapkan Visi Misi sebagai tujuan dari suatu organisai Partai Politik, dan setiap pimpinan dan para kader partai mematuhi AD/ART partai sebagai landasan hukum suatu organisasi.
3. Organisasi adalah percepat proses pendewasaan, supaya mampu mandiri dan bertanggungjawab. Menunjang proses belajar, menumbuhkan motivasi belajar yang kuat, tekad untuk berprestasi secara ilmiah, ambisi untuk maju, serta partisipasi sosial-politik yang sehat. Belajar bekerja dan belajar memimpin organisasi secara serius dan sistematis.

4. PPP memerlukan figur yang bisa dipercayai oleh setiap kadernya agar bisa menjadi panutan oleh setiap kadernya. Dan berpegang teguh pada asas Islam yang tercantum pada AD/ART, sehingga bisa meminilisir kebutuhan elite PPP akan patronase.
5. PPP harus lebih bekerja keras untuk meraih kepercayaan masyarakat dan membuktikan jikalau PPP memang sebagai rumah besar bagi umat Islam untuk menyongsong pemilihan umum yang akan datang.
6. Bagi Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat lebih bannyak menggali tentang apa itu HMI dan kepemimpinan. Yang menjadi kelemahan peneliti, sangat menyita bannayak waktu dikarenakan lokasi rumah peneliti dengn lembaga organisasi sangat jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, *Politik Islam Politik Pergaulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, (Yogyakarta, Tiara Kencana, 2006)
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. 1 Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2004)
- A. Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*, (Cet. 1. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007)
- Budiharjo,Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama 2008.
- Dahrendorf, Ralf, *Konflik Dan Konflik dalam masyarakat industry*, sebuah analisisakritik, Ali Hamdan (pentj.) Jakarta, CV. Rajawali, 1986.
- Sujana, Eggi, *Islam Fungsional, Paradigma Baru PPP*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara.2006),
- Firdaus, Bp : 09001, Institut Agama Islam Negri (IAIN) IB Padang *sikap politik Nahdatul ulama terhadap konflik partai kebangkitan bangsa sumatra barat, 2013*
- Gatara, Sahid, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Kajian*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007)
- Imam Muslim, Shahih Muslim. (Cet. 1. Bandung:Cipadung Cibiru, 2008)
- Joko, Sugianto, *Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa*, KORBID OKK DPP PPP (Cet.1 Jakarta . Januari 2010),

Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)

KORBID OKK DPP PPP, *Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa*,(Jakarta:Cetakan Pertama, Januari 2010)

Muliansyah Abdurrahman Ways.Political,Ilmu Politik, Demokrasi,Partai Politik Dan Welfare State. (Cet. 1, Yogyakarta:Mantrijeron. 2015)

Muh. Irfan Idris, Sosiologi Politik. (Cet. 1. Makassar:Alauddin University Press, 2010)

Muslim Mufti, Teori-Teori Politik. (Cet. 1. Bandung:Pustaka Setia, 2012)

Moch. Nurhasim, Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Cet.1. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2005)

Mohtar Mas' oed, *Perbandingan Sistem Politik*. (Cet. 18, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. 2008)

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah.(Cet. 1. Jakarta:Lentera Hati, 2002)

Nurul Radiatul Adawiyah, Bp : E11109003, Universitas Hasanudin, yang berjudul: *Konflik internal Partai Nasdem studi tentang partai nasdem sulawesi selatan, 2015*

Rahman Arifin, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional. (Cet.1. Surabaya,SIC:2002)

Rudyat, Charlie, Kamus Hukum. Edisi Lengkap.(Yogyakarta: Pustaka Mahardika 2016).

Siagian, P. Sondang, Dualisme, Teori dan Praktek Kepemimpinan (Jakarta: Rineka Cipta, 1985)

Yuni Wulandari NIM 3301409046 Univeristas Negeri Semarang “Dualisme Kepemimpinan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Adat Karang Paninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”, 2013

Sumber Lain :

Busyairi, SE Ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung 20 Juni 2018 pukul 15.15 WIB.

Hasil wawancara dengan Nursyamsi, S.T Ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung (Kepengurusan djan faridz)

Pernyataan Fadly Nursal yang merupakan salah seorang dari sembilan tim Formatur, kepada wartawan, Senin 18/4/2016 di Gedung DPR Jakarta yang di muat dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/18/masih-digodok-pengurus-dpp-ppphasil-muktamar-vii> dikutip rabu 16 08 2017 jam 07:00 Wib

Wawancara dengan Martias Tanjung, Kepengurusan Romahuruzy, Ketua Pelaksana Harian DPC Bandar Lampung Saat ini, pada tanggal 05 November 2017 di Kantor DPC Bandar Lampung, Jln. Pangeran Antasari, Bandar Lampung , Pukul 14.00 Wib

Wawancara dengan Albet , Kepengurusan Djan Faridz Nurdin yang merupakan pengurus DPC Bandar Lampung sebelumnya DPC, Jln. Pangeran Antasari, Bandar Lampung , Pukul 17.00 Wib

<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/13054851/Resmi.Ditutup.Ini.Hasil>

Muktamar.VIII.PPP.di.Surabaya.(pernyataan Romahurmuzy pada media kompas)

LIPUTAN 6.COM, *perseteruan partai persatuan pembangunan*, JAKARTA, 2014. Di akses pada 10 maret 2015

PEMILU.COM, *penyebab konflik internal partai persatuan pembangunan*, JAKARTA, 2014 di akses pada 10 maret 2015

Republika.co.id, *kisruh konflik elit partai persatuan pembangunan*, JAKARTA, 2014 di akses pada 10 maret 2015

